

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Abad 21 merupakan masa dimana kebebasan dan hak-hak rakyat dapat dikatakan telah didapatkan secara penuh terutama di negara-negara demokratis seperti Indonesia. Jika kita sedikit bercermin ke belakang tentang bagaimana hak-hak rakyat terutama hak untuk memberikan suara dalam menentukan pemimpinnya tidak didapatkan sebagaimana sekarang. Misalnya saja di Amerika perempuan baru memiliki hak suara setelah adanya amandemen ke-19 pada tahun 1920, sedangkan di Eropa hanya elite masyarakat saja yang diwakili dalam perwakilan (Budiardjo, 2010, hlm. 369). Namun dalam prosesnya semua golongan baik laki-laki maupun perempuan, kaum buruh maupun saudagar, orang tua maupun orang muda menuntut hak untuk dapat memilih perwakilannya terutama setelah berkembangnya pemikiran filsuf abad pertengahan dan modern yang salah satunya mempopulerkan konsepsi hak asasi manusia..

Di Indonesia sebagai negara berkembang dari masa orde lama, orde baru hingga era reformasi telah mengalami banyak sekali dinamika politik termasuk konsep kedaulatan rakyat. Pada masa reformasi dewasa ini berbagai bentuk partisipasi politik terus berkembang, bukan hanya sistem pemilihan langsung atau yang dikenal dengan “*voting*” dimana menganut prinsip “*one man one vote one value*”. Serta bentuk-bentuk partisipasi lainnya yang dapat dikatakan semuanya merupakan efek dari ketidakpercayaan rakyat terhadap partai politik selama ini sebagai suatu representatif. (Budiardjo, 2010, hlm. 367) mengatakan:

“Pada awalnya partisipasi politik memfokuskan pada partai politik sebagai pelaku utama, tapi seiring dengan berkembangnya demokrasi banyak muncul kelompok-kelompok masyarakat yang juga ingin mempengaruhi proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan umum, kelompok ini lahir di masa pasca industrial (*post industrial*) dan dinamakan gerakan sosial baru (*new social movement*)”

Gerakan masyarakat sebagaimana dikatakan di atas juga nampak di Indonesia. Pasca reformasi 1998 *kran* demokrasi begitu terbuka dengan deras, muncul berbagai gerakan serta konsepsi baru dalam berbagai bidang dan

kepentingan, misalnya dengan diterapkan sistem pemilihan umum langsung oleh rakyat, berdirinya berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), menjamurnya partai politik serta kelompok kepentingan lainnya.

Partisipasi politik (*political participation*) dalam bahasa Inggris dimana terdapat suatu kata kunci yakni “*part*” yang berarti “bagian” sebagaimana difahami bahwa partisipasi politik adalah keterlibatan rakyat untuk menjadi bagian dalam proses pemilihan yang tujuannya jelas yakni mempengaruhi pengambilan keputusan (*decision making*) yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagaimana dikatakan oleh Budiardjo:

“Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung maupun tidak langsung dan mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*)”. (Budiardjo, 2010, hlm. 367)

Suatu keniscayaan jika keterlibatan warga negara dalam proses politik akan memberikan pengaruh terhadap suatu kebijakan yang dikeluarkan maupun terhadap konstelasi yang terjadi. Pada awal mula pelibatan individu sebagai subjek partisipasi politik hanya terlibat dalam ruang lingkup memilih pimpinan negara baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana dikatakan di atas, namun seiring dengan perkembangan pemikiran dan transformasi sistem politik khususnya di Indonesia maka bentuk-bentuk partisipasi menjadi lebih variatif, bahkan Rush dan Althoff menggambarkan tingkat partisipasi politik kedalam suatu hirarki dimana yang paling tinggi ditempati oleh orang-orang yang menduduki jabatan di berbagai lembaga pemerintahan dan yang paling rendah diduduki oleh voting atau memilih pimpinan negara. Pemberian suara merupakan tingkat partisipasi yang paling rendah sebagaimana dijelaskan oleh Rush dan Althoff:

“Kegiatan pemberian suara dapat di anggap sebagai bentuk partisipasi politik aktif yang paling kecil karena hal itu menuntut suatu keterlibatan aktif minimal yang akan berhenti jika pemberian suara telah terlaksana, lagipula tanpa melihat pembatasan-pembatasan lainnya. Kegiatan pemberian suara ini tidak boleh dibatasi oleh seringnya pemilihan (Rush dan Althoff, 2013, hlm. 126)”

Oleh karena itu dirasa begitu penting partisipasi minimal bagi masyarakat yakni dalam pemilihan umum memilih pemimpinnya dan inilah yang dimaksud

dengan berpengaruh terhadap konstelasi, mari kita pikirkan apa jadinya jika masyarakat tidak mau menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpinnya, lantas pimpinan yang terpilih itu pilihan siapa?, karena suatu keniscayaan jika partisipasi yang paling minimal tidak dapat dilaksanakan maka bentuk-bentuk partisipasi lain yang menuntut lebih keaktifan warga negara tidak akan tercapai. Dengan demikian jelaslah menggunakan hak suara bukanlah sesuatu yang bisa ditinggalkan semaunya, namun hal tersebut adalah amanah, hasil perjuangan dan anugerah tuhan, oleh karena itu menggunakan hak pilih adalah salah satu tanggungjawab dari warga negara (*citizen responsibility*).

Sebenarnya jika dilihat dalam konteks lain partisipasi politik warga negara tidak dapat dibatasi hanya dengan cara yang baik/santun saja, namun beberapa ahli memandang bahwa keterlibatan warga negara dapat dilakukan dengan cara damai maupun kasar yang lebih dilihat dalam konteks ini adalah substansi dari partisipasi politik itu sendiri yakni “kegiatan mempengaruhi kebijakan pemerintah” sebagaimana yang dikatakan oleh Huntington dan Nelson dalam bukunya “*Not easy choice political participation in development countries*” sebagaimana dikutip (Budiardjo, 2010, hlm. 368):

“Partisipasi adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi –pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan, oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan mantap atau sporadis secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal dan efektif atau tidak efektif”

Jika menimbang pendapat di atas dapat dilihat bahwa secara mendasar partisipasi politik akan terus berkembang seiring dengan kemajuan keilmuan dan kebutuhan serta sistem yang berlaku di suatu negara. Meskipun pendapat-pendapat para ahli banyak menjelaskan tentang bentuk partisipasi politik serta penting atau tidaknya partisipasi politik, namun realita yang terjadi di negara-negara baik negara maju maupun berkembang, baik pada masyarakat golongan atas, bawah maupun rendah terkecuali mahasiswa sebagai masyarakat kelas elit yang sedang menimba ilmu di perguruan tinggi tidak dapat terlepas dari pengaruh globalisasi. “Golput” atau golongan putih yang telah menjadi sudut pandang baru di masyarakat dalam memilih pemimpinnya, baik memilih pimpinan di tingkat nasional maupun regional.

Amerika Serikat sebagai negara maju dan disebut-sebut sebagai kiblat demokrasi dalam memilih pimpinan negara hanya mencapai angka partisipasi di bawah 45 % begitupun di beberapa negara lainnya termasuk Indonesia. Sedikit meneropng tren golput yang ramai terjadi pada era orde baru sebenarnya tidak dapat disamakan dengan golput yang terjadi sekarang, pada saat orde baru tindakan golput adalah suatu sikap “perlawanan” terhadap pemimpin yang otoriter, berbeda dengan yang terjadi sekarang bahwa tindakan golput bukanlah suatu sikap perlawanan tapi “pemberian”.

Indonesia sebagai negara berkembang (*development countries*) memiliki banyak pemilih potensial atau pemilih pemula termasuk di dalamnya adalah mahasiswa sebagai kaum muda intelek yang digadang-gadang sebagai agen perubahan (*agen of change*) dan memiliki fungsi kontrol sosial (*social control*) dan jika melihat hal tersebut secara logika seharusnya mahasiswa memiliki tingkat partisipasi politik yang lebih tinggi daripada masyarakat biasa, bukan bermaksud melakukan dikotomi antara mahasiswa dan masyarakat, namun mahasiswa sebagai masyarakat elite seharusnya memiliki tanggungjawab dan peranan yang lebih besar.

Kampus menjadi tempat mahasiswa untuk belajar, menempa diri dan melakukan konsolidasi dalam menyikapi kondisi negeri dengan kata lain kampus adalah laboratorium demokrasi. Di kampus juga mahasiswa dapat memahami tentang siapa dirinya serta bagaimana peranannya sebagai mahasiswa. Banyak referensi yang berbicara soal mahasiswa. Mahasiswa yang secara harfiah terdiri dari kata “maha” dan “siswa” memiliki makna sebagai kaum akademik yang telah berada dalam tingkat yang paling tinggi. Komposisi yang berada dalam diri seorang mahasiswa tentu saja merupakan integral dari fungsi dan perannya. (Bestari, 2015, hlm. 4) mengatakan bahwa “seorang mahasiswa seyogyanya memberikan perubahan bagi daerahnya kelak maupun ketika mengemban studi di perguruan tinggi”. Hal ini berarti bahwa mahasiswa bukan pelajar biasa karena mengemban misi yang cukup berat. Walaupun secara kuantitatif jumlah mahasiswa tidaklah banyak jika dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk namun dengan jumlah yang kecil itu mahasiswa dapat menjadi lokomotif

pergerakan dan telah berhasil menorehkan tinta emas dalam tatanan sejarah bangsa Indonesia salah satunya adalah “reformasi”.

Sejarah telah banyak mencatat peranan mahasiswa dalam menentukan nasib bangsa jelas sebagai suatu partisipasi yang lebih tinggi dari pada pemberian suara dalam memilih pimpinan negara. Mahasiswa dan kualitas-kualitas yang dimilikinya menduduki kelompok elit dalam generasinya, sifat mahasiswa yang objektif, berani dan pelopor menjadikan peristiwa-peristiwa besar yang dalam prosesnya berpengaruh dan berdampak secara massif antara lain peristiwa aksi 1966 yang pada saat itu militer menjadi koalisi mahasiswa dan berhasil menumbangkan rezim Soekarno, 15 Januari 1974 atau dikenal dengan peristiwa Mallari (Malapetaka 15 Januari) dimana mahasiswa melakukan aksi besar-besaran di Jakarta yang menolak investor asing khususnya Jepang dan berujung dengan huru-hara dan penjarahan dan akibatnya pemerintahan Soeharto agak tergoyang.

Reformasi 1998 merupakan gerakan mahasiswa yang sangat dahsyat serta memberikan wajah baru dalam tatanan politik Indonesia khususnya kebebasan yang diperoleh mahasiswa dalam hal menyampaikan pendapat dan menyampaikan aspirasi secara lebih leluasa bahkan terkesan begitu bebas, hal tersebut merupakan salah satu hasil yang diraih mahasiswa melalui gerakan yang massif yang diawali dengan krisis ekonomi tahun 1997 dan rezim Orde Baru yang dikenal sebagai pemerintahan yang otoriter telah membuat mahasiswa bergerak.

Semua peristiwa dan gagasan-gagasan tentang kebangsaan dan keindonesiaan maupun keumatan yang secara umum dapat terwujud bukan tanpa sebab, mahasiswa yang konsisten melakukan perjuangan menegakkan kebenaran dan melawan tirani dan disertai dengan intelegensia sebagai ciri kaum intelektual adalah senjata ampuh yang dimiliki mahasiswa dalam mentransformasikan cita-cita bersama. Kondisi sebagaimana yang dilakukan oleh mahasiswa Indonesia pra reformasi nampaknya tidak terjadi pada mahasiswa Indonesia pasca reformasi.

Penurunan gerakan mahasiswa sempat terjadi pada masa orde baru akibat berbagai faktor, baik faktor kebijakan maupun perubahan paradigma pada mahasiswa akibat kuatnya arus globalisasi. Jika dibandingkan pola pergerakan mahasiswa pasca dan pra reformasi jelaslah berbeda karena berbagai perbedaan motif seperti keadaan politik, model akademik di kampus, keersediaan sarana dan

prasarana hingga sampai ke hal yang paling penting adalah *platform* atau nilai-nilai dan orientasi yang dimiliki oleh mahasiswa dalam melakukan pergerakan. Pembungkaman atau depolitisasi terhadap gerakan mahasiswa adalah hal yang tidak asing lagi. Salah satunya terjadi pada saat orde baru ketika Malari berfejolak, sebagaimana diungkapkan Wanandi (2014, hlm. 104):

“Malari bukan akhir dari usaha-usaha menentang kekuasaan Soeharto. Ancaman datang dari banyak pihak seperti militer, mahasiswa, pemuda, organisasi masa dan partai politik. Tahun 1977 hingga menjelang tahun 1978, demonstrasi mahasiswa masih terus berlangsung. Pemerintah menjawabnya tidak dengan membatasi demokrasi, yang sebagian besar datang dari Universitas Indonesia, tetapi dengan mengetatkan kurikulum agar mahasiswa lebih berkonsentrasi pada studi dan menurunkan politik baik di dalam maupun di luar kampus. Kebijakan “kembali ke kampus” di buat oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoud Joesoef. Tujuan pertamanya agar mahasiswa belajar lebih efektif. Tujuan kedua untuk membatasi politik mahasiswa”

Pergerakan yang dilakukan oleh mahasiswa akan senantiasa terkenang dalam sejarah Indonesia, mengingat begitu banyak sejarah yang diukir. Seperti yang diungkapkan Rudiarto (2010, hlm. 2) ada beberapa catatan momentum yang monumental dari sejarah mahasiswa Indonesia yaitu:

“Tahun 1908 lahirnya Boedi Oetomo, tahun 1928 lahirnya sumpah pemuda, tahun 1945 melahirkan gerakan mahasiswa 45, tahun 1966 melahirkan angkatan 66 orde baru, tahun 1974 melahirkan gerakan anti modal asing Jepang yang di kenal dengan malari 74, tahun 1978 melahirkan gerakan perlawanan perlawanan terhadap Soeharto langsung yang di kenal dengan gema 77/78, tahun 1980-an melahirkan gerakan mahasiswa pasca NKK /BKK, dan tahun 1998 melahirkan gerakan mahasiswa 98 yang menumbangkan rejim pemerintahan Soeharto”.

Begitu banyak catatan sejarah yang dilakukan oleh mahasiswa, begitu banyak perubahan yang ditorehkan dalam sejarah bangsa, namun tentu saja kita tidak berharap catatan-catatan sejarah mahasiswa tidak berhenti pada reformasi 98. Menjadi penting ketika mahasiswa sebagai agen perubahan sudah berkurang bahkan tidak mau lagi peduli terhadap masalah-masalah kebangsaan, kondisi-kondisi politik termasuk yang terkecil adalah memberikan suara dalam memilih pimpinan negara maupun pimpinan mahasiswa dalam ruang lingkup kampus. Fenomena apati politik menimpa mahasiswa salah satunya adalah mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) yang berada di Bandung. Sejak tahun 2007 sistem pemilihan pimpinan mahasiswa atau biasa disebut

Presiden Mahasiswa dipilih dengan menggunakan sistem pemilihan langsung dengan prinsip *one man one vote one value*, dimana setiap mahasiswa (S-1) memiliki hak untuk memilih dan tidak lagi menggunakan sistem keterwakilan ormawa tingkat departemen maupun fakultas.

Secara sadar dan terencana hendaknya suatu sistem dapat memberikan keunggulan-keunggulan yang dapat memberikan nilai positif terhadap suatu kondisi, namun masalah yang terjadi di UPI bukanlah sistem namun lebih kepada pelaksanaan sistem yang tentu saja berakar pada mahasiswa sebagai penerima hak pilih dimana akan dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini.

Kampus yang memiliki mahasiswa sekitar 36.000 ini nampaknya memiliki budaya politik yang masih rendah (budaya politik parokial) untuk saat ini, walaupun tidak bisa dipungkiri jika UPI (yang dahulunya IKIP Bandung) adalah tonggak pergerakan mahasiswa di Bandung bahkan nasional. Tingkat partisipasi politik mahasiswa dalam pemilihan umum pimpinannya di kampus (presiden mahasiswa) di kampus UPI cenderung rendah tingkat partisipasinya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sandra (2013, hlm. 65) dalam penelitiannya mengemukakan:

Berdasarkan hasil dokumentasi terhadap hasil data Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai daftar pemilih tetap (DPT) pemilihan umum raya presiden dan wakil presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia (BEM REMA UPI) tahun 2013 sebanyak 38.772, dan hasil pemungutan suara pemilihan umum presiden dan wakil presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2013, diperoleh data pemilih sebanyak 9.643.

Dari hasil pemilu yang dilaksanakan, jika dipersentasekan hanya mencapai 24,87 % walaupun pada tahun berikutnya (2014) ditemukan peningkatan jumlah partisipasi mahasiswa dalam pemilihan umum dengan angka partisipasi sebanyak 30,25% Kosasih (2011, hlm. 102). Angka yang tidak terlalu besar untuk partisipasi pada kalangan mahasiswa sebagai masyarakat elit yang di anggap memiliki tingkat intelegensia di atas warga negara pada umumnya.

Kondisi objektif sebagaimana dipaparkan di atas sudah barang tentu menampar dunia mahasiswa sendiri, mahasiswa sebagai tolak ukur warga negara sudah tidak melaksanakan partisipasinya. Jika diibaratkan pemilu dalam konteks

kehidupan bernegara adalah bentuk manifestasi kedaulatan rakyat maka secara analogi pemilu raya pada kehidupan mahasiswa merupakan manifestasi kedaulatan mahasiswa dalam kehidupan kampus. Namun di beberapa sektor politik kemahasiswaan masih cukup kental persaingan antar berbagai organisasi ekstra kampus maupun intra kampus dalam hal rekrutmen kader. Hal ini menjadi menarik ketika mahasiswa tidak mampu melaksanakan tingkat partisipasi terendah. Memang menjadi suatu kendala pelaksanaan demokrasi jika sudah banyak masyarakat yang apatis, sebagaimana di tulis oleh Mulgan mengatakan:

“Ada banyak gejala tidak wajar yang muncul. Dalam banyak demokrasi jumlah pemilih menurun dan keanggotaan partai juga perlahan-lahan menurun, dimana mereka tetap tinggi tingkat komitmennya juga menurun. Pemerintah-pemerintah yang sedang berkuasa cenderung bertahan bukan karena antusiasme tertentu tapi karena sinismeterhadap alternatif apapun. Kampanye-kampanye yang negatif terbukti lebih efektif dibandingkandengan yang positif dan gerakan-gerakan ketidaksetiaan yang tidak membangun terbukti lebih dinamis daripada sebaliknya . . .”  
(Mulgan, 1995, hlm. 4)

Menjadi suatu objek berfikir ketika melihat tataran idealism serta peran dan fungsi dari mahasiswa yang diproyeksikan dengan kondisi yang terjadi pada pemilihan umum Presiden mahasiswa UPI dewasa ini. Suatu fenomena yang terjadi terhadap eksistensi mahasiswa, sehingga penulis menilai ini layak untuk dijadikan penelitian serta berharap hasil daripada penelitian ini dapat bermanfaat sebagai refrensi dalam upaya melakukan reformasi peran dan fungsi mahasiswa.

Berdasarkan latar belakang permasalahan seperti yang telah dijelaskan di atas, peneliti hendak mengadakan penelitian mengenai **SUATU KAJIAN TENTANG FAKTOR-FAKTOR PENENTU TINGKAT PARTISIPASI POLITIK MAHASISWA DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN MAHASISWA UPI**, maka peneliti menganggap masalah ini layak untuk diteliti dalam rangka menggali faktor-faktor penyebab serta memunculkan solusi demi terwujudnya mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia yang berperan aktif dalam mempengaruhi berbagai keputusan maupun kebijakan.



## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Dalam penelitian ini dirumuskan masalah penelitian secara umum yaitu: Apa saja faktor-faktor penentu tingkat partisipasi politik mahasiswa dalam pemilihan umum presiden republik mahasiswa UPI.

Kemudian agar penelitian ini lebih operasional dan masalah umum tersebut bisa dikaji secara terfokus, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah sesuai dengan inti permasalahan melalui pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemilihan umum presiden REMA UPI pada 3 tahun terakhir?
2. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh KPU REMA UPI menjelang pemilihan presiden mahasiswa?
3. Apa saja motif yang melandasi tindakan mahasiswa menggunakan dan tidak menggunakan hak memilih dalam pemilihan presiden BEM REMA UPI?
4. Bagaimana solusi yang dapat ditawarkan untuk meningkatkan partisipasi politik mahasiswa dalam pemilu REMA UPI?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Umum penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penentu tingkat partisipasi politik mahasiswa dalam pemilihan presiden Republik Mahasiswa UPI

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Mengetahui secara historis pelaksanaan pemilihan umum presiden republik mahasiswa UPI selama 3 tahun terakhir.
2. Mengetahui upaya serta bentuk sosialisasi yang dilakukan KPU REMA UPI menjelang pemilihan umum presiden republic mahasiswa UPI
3. Mengetahui motif yang melandasi mahasiswa untuk menggunakan hak pilihnya dan yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan pimpinan mahasiswa.
4. Mendapatkan formulasi yang dapat ditawarkan untuk memperbaiki tingkat partisipasi politik mahasiswa yang rendah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian pada hakikatnya dapat diketahui atau diperoleh setelah melalui kegiatan penelitian, penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

##### **1. Manfaat dari Segi Teori**

Ditinjau dari segi teoritis penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan yang diekuni oleh peneliti yakni ilmu politik terutama dalam ikhwal partisipasi politik dan sosialisasi politik.

##### **2. Manfaat dari Segi Kebijakan**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menemukan faktor-faktor yang menjadi penentu partisipasi politik mahasiswa UPI dalam memilih presiden mahasiswa sehingga dapat dijadikan salah satu pertimbangan bagi para organisasi suprasuktur kemahasiswaan maupun untuk pihak kampus dalam meningkatkan partisipasi politik mahasiswa.

##### **3. Manfaat dari Segi Praktik**

###### **a. Bagi KPU REMA UPI**

- 1) Memberikan referensi tentang evaluasi pelaksanaan KPU dari tahun ke tahun serta faktor-faktor yang menjadi penentu partisipasi mahasiswa sehingga dapat dijadikan landasan pelaksanaan sosialisasi guna tercapainya partisipasi mahasiswa yang lebih baik.
- 2) Memotivasi KPU REMA UPI agar dapat melaksanakan pemilihan umum yang lebih demokratis, transparan serta diikuti oleh lebih banyak partisipan

###### **b. Bagi mahasiswa**

- 1) Memberikan deskripsi realitas mahasiswa UPI saat ini dalam hubungannya dengan faktor-faktor yang menentukan partisipasi politik mahasiswa yang variatif
- 2) Memotivasi mahasiswa agar lebih sadar soal peranannya yang dimulai dengan hal terkecil yakni memberikan suaranya dalam pemilihan umum presiden REMA UPI.

###### **c. Bagi pihak kampus**

- 1) Memberikan informasi berbasis penelitian tentang kondisi dan dinamika mahasiswa UPI terutama dalam hal pemberian suara memilih pimpinan mahasiswa

- 2) Memotivasi pihak birokrat kampus agar lebih intens terlibat dan terus mengikuti perkembangan mahasiswa dalam kegiatan berorganisasi guna menciptakan lulusan yang unggul.

#### **4. Manfaat dari Segi Isu dan Aksi Sosial**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pemikiran dan diangkat pada diskusi-diskusi mahasiswa sebagai suatu topic/issue yang kemudian akan bergulir menjadi wacana mengenai penting atau tidaknya partisipasi politik mahasiswa serta dapat memperbaiki sistem pemilu presiden mahasiswa ini berdasarkan faktor-faktor penentu yang telah ditemukan.

#### **E. Struktur Organisasi Skripsi**

Kerangka laporan penelitian untuk judul Suatu Kajian tentang Faktor-faktor Penentu Tingkat Partisipasi Politik Mahasiswa dalam Pemilihan Umum Presiden Republik Mahasiswa UPI adalah sebagai berikut:

##### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi.

##### **2. BAB II KAJIAN TEORI**

Pada bab ini berisi tentang kajian pustaka yang berisikan teori-teori, penelitian terdahulu yang relevan, posisi teoritis peneliti yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.

##### **3. BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi mengenai metode penelitian yang digunakan, lokasi dan subjek populasi/ sampel penelitian, desain penelitian, metode penelitian, definisi operasional, instrumen penelitian, proses pengembangan instrumen (teknik pengumpulan data, dan analisis data).

##### **4. BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi tentang temuan penelitian dan pembahasan.

##### **5. BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI**

Bab ini berisi simpulan, implikasi, dan rekomendasi, yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian.